



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

## **ORASI ILMIAH HAKIM KONSTITUSI**

# PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS KEMANUSIAAN DAN KEBANGSAAN INDONESIA

**Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS.**

**UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGJAPRANATA**

**DIES NATALIS KE-38**

**6 Agustus 2020**

**ORASI ILMIAH HAKIM KONSTITUSI**  
**PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.S.**  
**PADA DIES NATALIS KE-38 UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**“PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS**  
**KEMANUSIAAN DAN KEBANGSAAN INDONESIA”**

6 Agustus 2020

Selamat pagi;

Salam sejahtera bagi kita semua;

Salam Pancasila;

Salam Konstitusi.

- Yth. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P;
- Yth. Rektor Unika Soegijapranata, Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, beserta para Wakil Rektor dan jajaran;
- Ketua, Sekretaris, dan Pengurus Yayasan Sandjoyo;
- Ketua dan Anggota Senat Unika Soegijapranata;
- Para Dekan, Wakil Dekan beserta jajaran;
- Para Pejabat Struktural dan Fungsional;
- Para dosen, pengajar, mahasiswa, seluruh sivitas akademik Unika Soegijapranata;
- Hadirin; serta tamu undangan yang berbahagia dimanapun berada yang sedang mengikuti acara ini.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, karena dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk hadir dan bertatap muka dalam Rapat Senat Terbuka ini. Walaupun bertemu secara virtual, tidak dapat bersentuhan secara langsung, kita pastikan hal itu tidak mengurangi esensi forum yang mulia dan amat terhormat ini untuk memperingati dan merayakan Dies Natalis ke-38 Unika Soegijapranata.

Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Rektor dan seluruh civitas akademika Unika Soegijapranata atas capai-capaian yang diraih kampus ini selama 38 tahun berkiprah secara baik dan konsisten untuk turut berkontribusi mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Saya meyakini, selama 38 tahun berkiprah, sebagaimana motto "Talenta Pro Patria et Humanitate" yang berarti talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa-negara serta kemanusiaan, Unika Soegijapranata telah dan terus mengukirkan makna melalui sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Kesemuanya itu mengalir dan bermuara pada terbentuknya manusia-manusia Indonesia yang bukan saja cerdas secara intelegensia dan pikiran, melainkan juga manusiawi dan cerdas secara batiniah serta moral-spiritual berdasarkan nilai-nilai religius sebagaimana ajaran-ajaran mulia agama, dalam hal ini Katolik.

Saya meyakini, sejauh keberadaannya selama 38 tahun ini, Unika Soegijapranata telah menghasilkan insan-insan yang diharapkan memiliki kualitas dan integritas serta dilekati dengan karakter cendekiawan. Saya turut berharap, ke depan, Unika Soegijapranata akan terus dan terus eksis meningkatkan peran, kontribusi, dan kiprahnya dalam pengembangan ilmu dan mampu membuktikan manfaat serta makna eksistensinya di tengah masyarakat.

Yang kedua, saya merasa sangat terhormat dan untuk itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada kesempatan ini. Bagi saya, Unika Soegijapranata merupakan potret penting dan utama dalam perjalanan sejarah dan perkembangan pendidikan, utamanya pendidikan Katolik. Bukan semata di Semarang atau di Jawa Tengah, melainkan di Indonesia. Sejalan dengan nilai dan semangat besar yang dimiliki dan diperjuangkan oleh Monsinyur Albertus Soegijapranata, kampus ini berperan besar membangun nilai-nilai keindonesiaan yang ditegakkan di atas fundamen Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Bapak Gubernur, Bapak Rektor serta hadirin yang saya hormati,**

Pada kesempatan ini, sebagaimana tema Dies Natalis kali ini, yaitu “Integritas Ekologis”, saya akan menyampaikan orasi imiah dengan judul: Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Integritas Kemanusiaan dan Kebangsaan Indonesia.

Tema ini begitu aktual. Tema ini menjadi bagian dari diskursus pemikiran yang penting dan menarik di tengah situasi dan kondisi kita berbangsa dan bernegara pada masa sekarang ini. Dalam kondisi faktual hari ini, perguruan tinggi sebagai pilar perkembangan peradaban bangsa menjumpai tuntutan dan tantangan besar untuk menegaskan eksistensi, fungsi, tanggung jawab, dan kemanfaatan nyata bagi bangsa, bagi negara, dan bagi masyarakat. Perguruan tinggi tidak boleh terjebak dan tersandera sekedar menjadi menara gading, sekedar pabrik wacana, apalagi menjauhkan diri dari kebutuhan dan kepentingan kehidupan masyarakat.

Perguruan tinggi patut meneguhkan perannya dalam kerangka itu, karena tidak dapat dipungkiri, perguruan tinggi mempunyai peran paling strategis dan menentukan dalam pembangunan bangsa dan peradaban. Hal ini sama sekali tidak hendak mengesampingkan atau mengecilkan nilai dan peran pendidikan di level pendidikan pada level bawah. Namun, penting dipahami, kesuksesan dan kejayaan pendidikan di level bawah amat bergantung pada keberhasilan pendidikan tinggi. Bagaimana tidak, tenaga akademik, pembuat kebijakan pendidikan, penyusun kurikulum pendidikan, penulis bahan-bahan pelajaran formal, dan nonformal bagi semua pendidikan di level bawah bukan lain merupakan produk dan hasil dari kiprah perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, menjadi wajar manakala diungkapkan bahwa potret peradaban suatu bangsa pada hari ini dan masa mendatang sesungguhnya tercermin dari wajah perguruan tinggi. Semakin baik wajah perguruan tinggi, semakin berperan perguruan tinggi, semakin dekat perguruan tinggi dengan solusi persoalan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peradaban suatu bangsa.

Dengan kata lain, perguruan tinggi memiliki posisi penting dan strategis bagi langkah maju, bahkan lompatan positif peradaban suatu bangsa. Maka dari itu, sering pula dikatakan, perguruan tinggi tidak lain adalah proyek peradaban masa depan suatu negara. Dari perguruan tinggi inilah, akan lahir kaum cerdas cendekia, orang-orang dengan kapasitas keilmuan mumpuni, dan manusia-manusia yang turut berempati dan bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa ini. Itu sebabnya, perguruan tinggi

merupakan institusi yang dipandang memiliki kredibilitas tinggi di mata publik. Mengapa demikian? Karena perguruan tinggi sejauh ini terbukti secara nyata masih selalu berpegang pada akar orisinilnya untuk berpikir dan bersikap kritis, obyektif, responsif menjadi *problem solver*, serta selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Atas dasar itulah, perguruan tinggi harus mampu meneguhkan peran untuk menghasilkan terobosan-terobosan konstruktif bagi peningkatan kualitas peradaban bangsa. Hal itu dilakukan melalui itu tiga ranah utama yang disebut sebagai tridarma perguruan tinggi. Tiga ranah peran pendidikan tinggi terutama terkait aspek pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran; riset dan inovasi; serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui tiga peran sentral itulah peran utama perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka pencerdasan kehidupan bangsa selalu dan terus dibutuhkan sepanjang masa, sepanjang perjalanan sejarah dan masa depan suatu bangsa.

### **Bapak Gubernur, Bapak Rektor serta hadirin yang saya hormati,**

Dalam konteks keindonesiaan, perguruan tinggi bukan lagi hanya dituntut menjadi laboratorium ilmu, melainkan juga dituntut sekaligus diharapkan menjadi laboratorium kemanusiaan. Pengembangan karakter manusia Indonesia seutuhnya dalam arti karakter yang sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai luhur kebangsaan, menjadi tantangan yang semakin nyata dan semakin penting. Perguruan tinggi harus siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak guna menjawab tantangan besar tersebut.

Dengan begitu, produk perguruan tinggi diharapkan menjadi figur manusia yang *humanum*, menghargai keberagaman, memiliki daya saing serta kemampuan berkolaborasi untuk menyongsong setiap situasi dan tantangan pada setiap zaman. Dengan kalimat lain, saya ingin mengatakan, dari perguruan tinggi inilah akan lahir generasi bangsa yang punya karakter pembaharu, memiliki tradisi intelektual yang kuat, berwawasan global tetapi tidak meninggalkan kearifan serta kepribadian luhur bangsa ini.

Sebelum mengemukakan tema utama orasi ilmiah sebagaimana yang tadi saya kemukakan, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat, menelaah, dan memahami kembali dengan baik amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait dengan bidang pendidikan.

Dari perspektif konstitusi, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas bahwa tujuan, visi, dan misi nasional kebangsaan dan kenegaraan kita adalah *...untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*. Sudah barang tentu, semuanya dilandaskan pada dasar negara Pancasila yang telah diamanatkan oleh *the Founding Fathers*. Untuk mewujudkan tujuan, visi, dan misi nasional tersebut, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak dapat tidak, pencapaiannya harus dengan dan melalui proses pendidikan.

Oleh karena itulah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimuat dalam Pasal 31 tegas dan jelas mengamanatkan agar setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jelas bahwa hak mendapatkan pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara. Hak mendapatkan pendidikan bagi warga negara menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menyediakan pendidikan. Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Tujuan, visi, dan misi nasional tersebut mengimplikasikan kewajiban negara dan Pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Dalam kalimat lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itulah maka negara Indonesia merdeka ini dibentuk dan didirikan. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi juga menimbulkan tanggungjawab negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut.

Filosofi konstitusional “mencerdaskan kehidupan bangsa” itulah yang harus dijadikan dasar penyelenggaraan pendidikan oleh perguruan tinggi yang bukan saja bertujuan mengembangkan kemampuan akademis, melainkan juga membentuk watak dan karakter keindonesiaan sebagai bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan peran perguruan tinggi, baik pada kini maupun pada masa mendatang, harus bertitik tolak dan sekaligus berorientasi pada landasan filosofis tersebut.

## **Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,**

Berpijak pada amanat konstitusional penyelenggaraan pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan, visi, dan misi nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, salah satu tantangan terbesar perguruan tinggi ialah berperan dalam menjawab persoalan-persoalan kebangsaan kontemporer sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu problem serius yang sedang kita hadapi pada masa sekarang ini ialah berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi kita bernegara yang mengalami marginalisasi sedemikian rupa. Hampir setiap waktu, suguhan audio, visual, dan literasi yang dihadirkan mengantarkan fakta empirik problem tersebut. Nilai-nilai luhur Pancasila mengalami krisis pada tataran praktik implementasi. Dalam bahasa budayawan Radhar Panca Dahana, Pancasila mengalami 'show of rethorics',<sup>1</sup> karena Pancasila lebih sering diucapkan, namun esensinya tak tecermin dalam perilaku anak-anak bangsa.

Pada pelbagai sudut kehidupan, nilai-nilai luhur Pancasila tergusur. Kesantunan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, dan 'tepaselira' menjadi 'barang' langka yang sulit ditemui. Pelanggaran etika dan hukum dianggap lumrah. Sektor perekonomian mencetak potret besar kaum kapitalis. Eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam di banyak tempat tak kuasa dibendung. Meskipun masih ada, nasionalisme dan patriotisme terus-terusan digempur mental pragmatis. Kecintaan pada bangsa tergusur oleh ketidakpedulian terhadap sesama. Sebagian lagi hanyut terseret liberalisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Penetrasi gelombang globalisasi, demokratisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan media informasi, melahirkan dampak dan persoalan di tataran nasional.

Sebagai contoh betapa nyatanya problem itu ialah pada masa sekarang ini, kita mengalami yang namanya krisis toleransi<sup>2</sup> atau lazim disebut dengan intoleransi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Istilah ini digunakan budayawan Radhar Panca Dahana dalam satu tulisan mengenai nasib demokrasi yang selalu mengundang kritik, perdebatan, diskurys tiada habisnya, baca Radhar Panca Dahana, *Kebudayaan dalam Politik: Kritik pada Demokrasi*, Penerbit Bentang, Yogyakarta, 2015, hlm. 364.

<sup>2</sup> Diana L. Eck, menyebut toleransi muncul dari pihak yang kuat posisinya. Dikatakan Diana, saya dapat toleran dengan banyak kelompok minoritas jika saya kuat (berkuasa), tapi jika saya sendiri dari kelompok minoritas, apa artinya toleransi? Diana L. Eck., *A New Religious America: Managing Religious Diversity in a Democracy: Challenges and Prospects for the 21st Century* pada *MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies*, di Kuala Lumpur, Malaysia, 20-21 Agustus 2002. Dalam memaknai atau implementasi konsep toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, penafsiran toleransi yang bersifat negatif. Artinya mensyaratkan adanya sikap membiarkan, tidak intervensi, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Baik kepada mereka yang berbeda maupun yang sama agama atau kepercayaan. Kedua, penafsiran toleransi bersifat positif. Toleransi positif artinya mensyaratkan adanya bantuan atau dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain yang

Problem ini memiliki spektrum luas dengan seringnya berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermula dari krisis toleransi ini, yakni hilangnya respek terhadap orang lain yang memiliki iman (religius), pemikiran (politis), atau keturunan (rasistis) yang berbeda.<sup>4</sup>

Saya katakan sebagai problem serius karena intoleransi itu jelas-jelas bertentangan secara diametral dengan semangat dan kesadaran kolektif the Founding Fathers ketika dulu mendirikan negara ini. Harus kita ingat kembali, negara ini dibangun di atas fondasi keberagaman entitas, baik pemikiran, ideologi, etnis, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, gender, aliran politik, kepercayaan maupun agama, yang kemudian berhasil menemukan kompromi dan kanal kesepakatan. Perbedaan itu tak menghalangi para pendiri negara ini bertoleransi untuk bersatu memerdekakan negara ini.

Namun sekarang, toleransi itu seperti sedang terpukul jatuh. Perbedaan justru menjadi ancaman yang memicu perseteruan sesama warga. Pihak yang berbeda dianggap ‘liyan’ oleh pihak lain. Mereka yang berbeda atau disebut ‘liyan’ diposisikan bukan sebagai bagian kelompoknya, bahkan cenderung dianggap sebagai lawan yang harus ditundukkan. Krisis empati, kemanusiaan, dan kebangsaan terjadi.

Kondisi demikian menggejala dimana-mana, merangsek hampir di setiap jengkal kehidupan bernegara, termasuk pada ranah sosial, politik, budaya, dan ranah lainnya. Contoh sederhana, pada era digital dan kebenaran informasi sekarang, media sosial yang mestinya menjadi perangkat komunikasi demokratis justru, kerap diwarnai ungkapan saling cerca, saling olok, saling menjatuhkan, dan saling serang, antara lain karena faktor perbedaan, baik dalam pendirian, pendapat sikap, atau pilihan-pilihan. Beberapa diantaranya bermuatan *hoax*, *hate speech*, provokasi, bahkan ajakan berkonflik dalam skala nyata.

Perlahan tapi pasti, problem demikian dapat merongrong nilai dan semangat keindonesiaan. Kondisi itu membuat koyak kohesi sosial masyarakat. Penandanya,

---

berbeda agama atau kepercayaan, Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2001, hlm. 13.

<sup>3</sup> Intoleransi pun dapat dimaknai dalam dua makna, dalam arti positif dan negatif. Dalam arti positif, intoleransi merupakan sikap tegas (tidak memihak pada golongan, kelompok, atau umat beragama tertentu dalam memutuskan keadilan), konsekuen, atau taat asas. Sementara, dalam makna negatif, mengacu pada aksi-aksi tak hormat pada perbedaan seperti aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan.

<sup>4</sup> Ini distingsi menurut filsuf Italia, Norberto Bobbio, dalam F. Budi Hardiman, “Toleransi Atas Intoleransi”, *Harian Kompas*, 30 Mei 2012



semakin hari semakin berkembang rasa saling tidak percaya, curiga mencurigai antara sesama warga, dan kadar empati serta solidaritas sosial yang rendah. Muncul pula keinginan untuk memaksakan atau mendominasi suatu kebenaran tertentu. Padahal, keadaan itu hanya akan melahirkan perseteruan yang tak akan dimenangkan (*unwinnable war*) oleh siapapun. Sebab, yang jelas-jelas akan mengalami kerusakan ialah integrasi Indonesia ini.

Situasi demikian sudah pasti akan menghambat pencapaian idealita negara bangsa yang dicita-citakan oleh *the Founding Fathers*. Pada titik inilah, perguruan tinggi harus dapat menunjukkan peran dan kontribusi optimalnya. Perguruan tinggi harus mampu menjadi katalisator bagi kembalinya nilai-nilai luhur kebangsaan berdasarkan Pancasila ke dalam relung-relung hati, pikiran, dan kepribadian anak-anak bangsa.

### **Bapak Gubernur, Bapak Rektor serta hadirin yang berbahagia,**

Lantas, bagaimana perguruan tinggi dapat berperan dalam konteks persoalan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya membagi uraian pemikiran ke dalam dua bagian besar. Pertama, peran perguruan tinggi tidak terlepas dari adanya pergeseran kekuasaan negara yang pada akhirnya berimplikasi pada peran perguruan tinggi. Kedua, upaya mengembalikan peran strategis perguruan tinggi untuk membangun integritas kemanusiaan dan kebangsaan dalam corak langkah yang sesuai dengan konteks zaman kekinian.

Terhadap hal yang pertama, saya ingin mengatakan, mengaktualisasi dan mengumandangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang terkandung di dalam Pancasila merupakan tugas semua komponen bangsa, bukan hanya merupakan tugas Pemerintah. Dibutuhkan peran, kolaborasi, dan sinergi segenap komponen bangsa untuk menghadirkan strategi yang efektif dan tentu saja cocok dengan situasi kekinian.

Meletakkan beban itu semata-mata di pundak negara atau Pemerintah jelas tidak dimungkinkan. Apalagi secara faktual, dari zaman ke zaman, Pemerintah mengalami semacam 'reduksi *power*'. Dari semula sangat *powerfull*, tahap demi tahap mendapat momentum reduksi. Dalam khasanah ketatanegaraan, sosok negara tercermin dalam pilar-pilar kekuasaan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut secara

*orchestrated* menjalankan fungsi masing-masing dalam batas-batas yang diatur di dalam konstitusi. Ketiganya lazim disebut sebagai pilar kekuasaan negara. Melalui tiga cabang kekuasaan negara inilah, kebijakan negara terlahir untuk dijalankan semua komponen negara. Negara begitu *powerfull* dalam konteks ini.

Seiring perkembangan hak asasi manusia dan demokrasi pada abad 17 dan 18, kehadiran pers atau media massa merangsek masuk memengaruhi otoritas pengambilan kebijakan negara oleh tiga cabang kekuasaan tersebut. Dari sudut pandang Teori Pers Bebas (Libertarian Theory), pers bertujuan melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah. Kebebasan pers menjadi keniscayaan untuk membantu warga negara mencari kebenaran hakiki serta melindungi dan menjaga hak warga negara dari kebijakan yang sewenang-wenang.<sup>5</sup> Maka, pers menjadi aktor dengan fungsi kontrol terhadap Pemerintah. Atas dasar itu, pers disebut sebagai “The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat”. Konsekuensinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak lagi secara *powerfull* menggunakan kewenangannya karena ada kekuatan pers yang mengontrol.

Lebih lanjut, kehadiran *civil society* melalui eksistensi organisasi massa, *non-government organization* (NGO), atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada gilirannya juga mereduksi kewenangan tiga cabang kekuasaan negara. Sama seperti halnya pers, *civil society* menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah. Bahkan *civil society* tergolong sebagai kelompok kepentingan (*pressure group*) yang dapat memengaruhi kebijakan negara. Sampai sejauh ini, pers dan *civil society* memiliki kekuatan peran menjadi alat kontrol bagi negara dan Pemerintah.

Dalam kurun satu dasa warsa terakhir, ketatanegaraan memasuki dinamika baru seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi era digital. Keberadaan media berbasis teknologi internet menciptakan dan menghadirkan media sosial dan netizen sebagai kekuatan baru yang turut memengaruhi kebijakan negara. Dalam sebuah tulisan 10 tahun lalu, Hermawan Kertajaya menyebut netizen sebagai kekuatan baru di Dunia *New Wave*.<sup>6</sup> Dalam tulisan itu dinyatakan, awal mula eksistensi netizen merupakan impian Michael Hauben, anak muda 22 tahun, di tahun 1995. Di tengah

---

<sup>5</sup> S. Siebert, Fred, dkk., *Empat Teori Pers*, Jakarta, Intermedia, 1986, hlm. 2.

<sup>6</sup> Hermawan Kertajaya, “Netizen: Kekuatan Baru di Dunia *New Wave*,” *Kompas.com*, 10 Oktober 2010 WIB, <https://olahraga.kompas.com/read/2010/10/10/15552881/netizen.kekuatan.baru.di.dunia.new.wave>. Diunduh 15 Juli 2020 pukul 10.19 WIB.

merebaknya fenomena internet saat itu, Hauben memimpikan adanya suatu gaya hidup masyarakat yang terkoneksi lewat internet.<sup>7</sup>

Impian Haubenn menjadi nyata. Kini, seseorang tak lagi hanya mempunyai identitas kewarganegaraan (*citizenship*), melainkan memiliki identitas sosial di dunia internet (*netizenship*). Netizen merupakan gabungan kata *internet* dan *citizen*. Ia adalah penduduk di dunia virtual. Layaknya penduduk di dunia fisik, mereka memiliki identitas kependudukan sipil (*avatar, username*), punya rumah (*homepage*), punya kotak pos untuk surat menyurat (alamat *e-mail*), dan punya telepon (*VoIP: Voice over Internet Protocol*). Netizen bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu menggunakan *browser*, apakah itu Firefox, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Tulisan itu mengonfirmasi Geoff Livingstone yang mengatakan, *social media has assumed its place in the larger media mix. It has become the fifth estate.*<sup>9</sup> Media sosial, kata Livingstone, telah mengambil peran dalam percampuran media yang secara lebih besar. Media sosial telah menjadi kekuatan atau kekuasaan kelima. Maka dari itu, netizen sebagai pengguna media sosial layak disebut “The Fifth Estate” yang melengkapi empat pilar sebelumnya: legislatif, yudikatif, eksekutif, dan pers.

Isu kebijakan, kebenaran, dan opini, dengan pendekatan komunikasi *top down* tak lagi dapat dipertahankan. Pada era ini, komunikasi bersifat menyebar. Siapa saja dapat memproduksi informasi atau berita. *Netizen* ini bukan sekedar konsumen, mereka bisa menjadi produsen informasi. Dengan mengunggah konten, baik video, foto, atau konten lain terkait isu kebijakan tertentu, netizen dapat ‘bersuara’, menyalurkan ekspresi, menyampaikan aspirasi, pendapat kepada netizen, serta memproduksi informasi lainnya.

Bermodal saling *share* konten media sosial, netizen dapat menggalang kekuatan untuk menggerakkan opini massa. Dalam berbagai bidang kebijakan, kekuatan netizen di media sosial memberikan tekanan tersendiri, bahkan acapkali mampu memengaruhi proses pengambilan kebijakan negara. Maka tidak mengherankan, dalam rentang waktu belakangan ini bermunculan figur-figur *influencer* di media sosial. Mereka memiliki

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Op.cit.*

<sup>9</sup> Geoff Livingstone, *Welcome to The Fifth Estate: How To Create and Sustain a Winning Social Media Strategy*, Bartleby Pr, 2011, hlm. 9.

pengaruh kuat bagi *followers* untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bahkan menjadi model atau panutan yang ditiru. Itulah kekuatan luar biasa media sosial.

Dalam pandangan saya, apabila realitas itu dihubungkan dengan konteks pembumian nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dalam Pancasila, kolaborasi dengan *influencer* media sosial merupakan langkah yang sudah harus segera diambil. Saya meyakini, para *influencer* dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan *awareness* netizen terhadap nilai-nilai Pancasila. Di tangan para *influencer*, konten-konten bermuatan nilai-nilai Pancasila dapat dikemas dan ditampilkan secara original, inovatif, atraktif, dan kekinian sesuai *style*, corak, gaya, dan karakter generasi kekinian pada era teknologi maju seperti sekarang.

### **Saudara-saudara, hadirin sekalian yang saya hormati,**

Fenomena kekuatan luar biasa media sosial menunjukkan bahwa hari ini, apa yang ditampilkan di ruang-ruang virtual, potensial membawa pengaruh besar. Maka, akan berlaku adagium: siapa yang mampu memanfaatkan dan mengisi ruang-ruang publik virtual, berarti dia memiliki peluang dan kekuatan untuk memengaruhi publik.

Pada titik ini, bukan tidak mungkin, peran perguruan tinggi sebagai *moral force* semakin termarginalkan oleh kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh media sosial dan dunia maya pad umumnya. Saat ini, melalui ruang-ruang virtual kita bisa memperoleh informasi apa saja yang kita butuhkan, termasuk yang selama ini dilakukan atau disediakan oleh perguruan tinggi. Bahkan, sudah bermunculan ruang kuliah dan universitas virtual. Di Amerika, hampir semua perguruan tinggi ternama telah membuka kampus digital atau e-campus. Bahkan, terdapat perguruan tinggi yang membuka 50 program master di kampus secara virtual.

Dalam kuliah di dunia virtual beberapa tahun belakangan, diperkenalkan “Second Life”, sebuah jagad maya, atau tepatnya semacam permainan virtual tiga dimensi yang mampu menghubungkan setiap orang dari penjuru dunia. Misalnya, ada kelas bahasa Inggris di Universitas Ball State Indiana, Inggris. Karakter dosen virtual itu mengenalkan diri sebagai Intellagirl dengan rambut serba pink dan dandanan menor. Dalam dunia nyata, dosen itulah ialah Sarah Robbin, seorang doktor dari kampus yang sama. Di “Second Life”, dosen dan mahasiswa secara leluasa memilih dan menggunakan karakter dan nama. Saat ini, ada tidak kurang dari 300 universitas di seluruh dunia

yang memiliki ‘tanah virtual’ di “Second Life” untuk mendukung kuliah virtual. Tegasnya, teknologi virtual menjadi lompatan besar bagi dunia pendidikan, utamanya pendidikan tinggi.

Dalam konteks inilah, saya ingin menyampaikan hal penting yang kedua, yakni bagaimana upaya mengembalikan peran strategis perguruan tinggi untuk membangun integritas kemanusiaan dan kebangsaan dalam corak langkah yang sesuai dengan konteks zaman kekinian.

Sebagaimana kita ketahui, sivitas akademika yang dimaksud dalam Undang-Undang Perguruan tinggi merupakan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi juga dinyatakan, salah satu fungsi perguruan tinggi ialah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.

Dalam era digital dan teknologi maju sekarang, masyarakat akademik di perguruan tinggi dituntut sedemikian rupa untuk mampu mengisi ruang-ruang publik virtual dengan konten-konten informasi menarik dan valid berbasis kebenaran ilmiah, demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat memberikan secara lebih optimal pada masa kekinian, sivitas akademik perguruan tinggi harus dapat menjadi selayaknya *influencer* bagi publik dan masyarakat. Menyuarakan kepentingan rakyat, menjawab persoalan kebangsaan, sekaligus menjadi motor dan kolaborator aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila melalui ruang-ruang publik virtual.

Hal itu meniscayakan segi-segi tantangan bagi sivitas akademik, yaitu tantangan untuk memanfaatkan dunia virtual, terutama membuat konten audio visual di ruang-ruang publik virtual, yang dikemas secara atraktif dengan informasi yang valid dan akurat sehingga mengundang ketertarikan untuk disaksikan sekaligus memberikan daya pengaruh signifikan bagi publik, dalam hal ini netizen. Seiring dengan itu, perguruan tinggi harus mampu mengekspresikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai

Pancasila dalam skala yang lebih luas dalam format-format yang ramah netizen pada ruang publik virtual.

Dengan demikian, kemampuan perguruan tinggi mengisi ruang-ruang publik virtual, terutama media sosial, menjadi agenda baru untuk secara lebih efektif meneguhkan perannya memindai nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan ke level operasional-implementatif. Targetnya jelas, eksistensi perguruan tinggi di ruang-ruang publik virtual akan membawa Pancasila dengan segenap nilai-nilainya mampu menemukan momentum terbaik untuk diterima dan mengisi *mindset*, *attitude*, serta sisi terdalam nurani kesadaran kolektif anak-anak bangsa. Dengan demikian pula, perguruan tinggi memiliki peran signifikan mewujudkan tujuan, visi, dan misi nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Yang dapat dan perlu dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan perannya menjaga dan membangun integritas kemanusiaan dan kebangsaan berdasar Pancasila ialah kemampuan berkreasi dan beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan kemajuan teknologi informasi pada era digital dan lompatan virtual.

**Bapak Gubernur, Bapak Rektor, hadirin tamu undangan yang berbahagia,**

Demikian orasi ilmiah ini. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan tadi menjadi bahan dan menggugah pemikiran kita bersama untuk lebih siap menghadapi tantangan.

Sebelum mengakhiri orasi ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademik Unika Soegijapranata. Semoga, Tuhan Yang Maha Pengasih memudahkan langkah ke depan untuk menggapai harapan dan cita-cita kita selanjutnya dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dirgahayu Unika Soegijapranata!

Sekian dan terima kasih.

Salam Konstitusi!